

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Governance atau tata kelola merupakan serangkaian langkah yang terfokus pada pengambilan keputusan demi mencapai tujuan suatu organisasi. Menurut Anggara (2012), *Governance* merupakan proses pengelolaan, pengarahan, dan penyelenggaraan organisasi, termasuk aspek pemerintahan. Jika elemen-elemen ini dijalankan dengan baik dalam konteks pemerintahan, hal tersebut dikenal sebagai *Good Governance* atau pemerintahan yang baik. Dalam konteks aturan undang-undang, *Good Governance* atau pemerintahan yang baik harus mematuhi undang-undang dan peraturan terkait serta memastikan bahwa aspek tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemberdayaan masyarakat di wilayah desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta pengelolaan sumber daya yang efektif menggunakan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, sesuai dengan informasi dari Kementerian Desa (2015), disesuaikan dengan prioritas Nawacita yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terdapat beberapa tujuan khusus yang termasuk di dalamnya. Salah satu di antaranya yakni mengutamakan pembangunan Indonesia dari daerah terpinggirkan

dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam konteks kesatuan negara. Tujuan utama dari pembangunan pedesaan adalah mencapai kemandirian dengan memprioritaskan kearifan lokal dan potensi yang ada di wilayah pedesaan itu sendiri melalui penyatuan kebijakan pembangunan pedesaan dengan prinsip-prinsip UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pentingnya desa memiliki sebuah entitas bisnis yang bertujuan mengelola ekonomi, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh desa. Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal No 4 Tahun 2015 mengatur tentang pembentukan, manajemen, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Melalui kebijakan ini, diharapkan desa mampu mengelola serta mengembangkan kegiatan ekonomi bagi masyarakatnya sendiri melalui Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan arahan. (Kemendes PDTT 2015).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa bukan hanya menjadi langkah, melainkan juga menjadi salah satu sarana bagi Pemerintah Desa guna mengoptimalkan potensi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Selain itu, BUMG juga diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan layanan publik bagi warga desa, dengan tujuan mempercepat pencapaian kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat pedesaan, mengurangi kesenjangan pembangunan di tingkat Nasional, serta memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek utama dalam proses pembangunan.

(Sumber: <https://www.kemendagri.go.id/beritaartikel/beritakemendagri,diakses> pada tanggal 20 Desember 2021).

Gampong Cot Gapu adalah salah satu gampong yang ada di Kabupaten Bireuen dan sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) bernama “Merpati Putih”. Unit usaha yang dimiliki meliputi :

Table 1.1 Nama Jenis Unit Usaha BUMG Gampong Cot Gapu

No	Lokasi	Unit Usaha
1	Dusun Tengah	Objek Wisata Waduk Buatan
2	Dusun Selatan	Jasa Servis AC

Sumber : Profil BUMG Gampong Cot Gapu Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat unit usaha yang ada di Gampong Cot Gapu yaitu Jasa Servis AC terletak di Dusun Selatan dan Objek Wisata Waduk Buatan yang terletak di Dusun Tengah.

Dari unit usaha tersebut, seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kesejahteraan yang diharapkan adalah peningkatan Pendapatan Asli Desa, meskipun manfaat dari peningkatan ini tidak selalu dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Namun berdasarkan hasil hasil observasi peneliti unit usaha Jasa Servis AC dan Wisata Waduk Buatan perkembangannya tidak berjalan maksimal padahal dari tingkat kelembagaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Merpati Putih Cot Gapu sudah terverifikasi berbadan hukum secara resmi. Sangat disayangkan sekali ketika program BUMG yang sudah sangat baik dalam kelembagaan namun dalam praktik pengelolaannya tidak berjalan sesuai harapan.

Kondisi terkini unit usaha Jasa Servis Ac yang ada di Gampong Cot Gapu dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 1.1 Gambaran Unit Usaha Jasa Servis AC

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat keadaan unit usaha Jasa Servis AC yang memiliki permasalahan infrastruktur fisik yang tidak memadai. Tempat usahanya berada dalam gudang bekas tanpa adanya perawatan yang layak. Keadaan ini menciptakan kesan kurang profesional oleh pengelola BUMG Merpati Putih dan kurangnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa tersebut. Ruang kerja yang seharusnya menjadi tempat memperbaiki dan merawat AC, ternyata minim perlengkapan. Peralatan yang tidak lengkap menjadi masalah serius, menghalangi proses pelayanan yang optimal peralatan yang terbatas, tidak mencukupi untuk melakukan beragam perbaikan yang dibutuhkan. Kebutuhan dasar, seperti alat-alat pengukur atau peralatan teknis yang harusnya ada, nyaris tidak tersedia.

Kondisi unit usaha Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Cot Gapu yang lainnya yaitu Objek Wisata Waduk Buatan sangat memperhatikan karena sudah tidak terawat dan terbelengkalai padahal Gampong Cot Gapu memiliki letak gampong yang strategis untuk menjalankan program Badan Usaha milik Gampong (BUMG) pada unit usaha wisata, mengapa

lokasi tersebut strategis karena berdekatan dengan kompleks wisata kuliner yang berada di Gampong Cot Gapu milik swasta sehingga sangat berpotensi jika membuat wisata alam untuk melengkapi tujuan pengunjung berwisata baik dari daerah maupun dari luar Daerah.

Berdasarkan observasi dilapangan peneliti menemukan data gambaran keadaan terkini Unit usaha Objek Wisata Waduk Buatan Gampong Cot Gapu sebagai berikut :

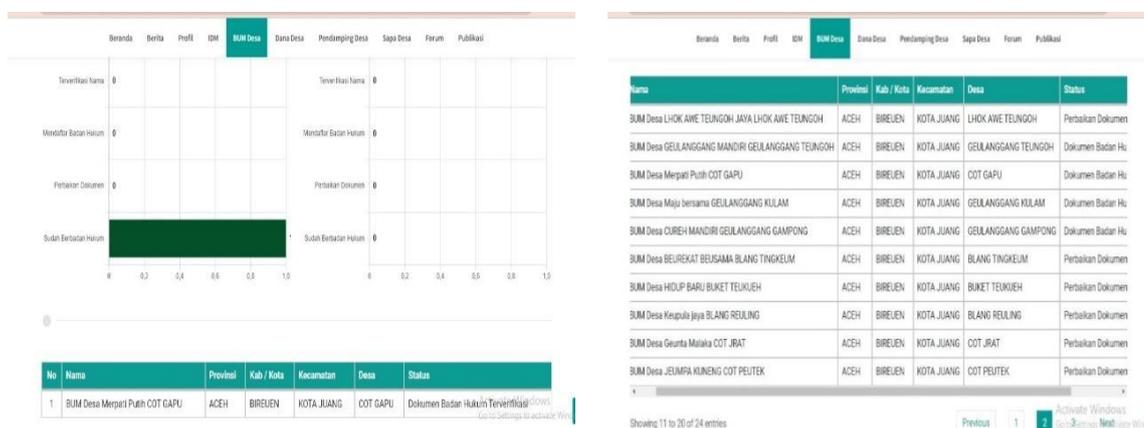


Gambar 1.2 Gambaran Unit usaha Objek Wisata waduk Buatan Gampong Cot Gapu

Dari gambar terlihat keadaan lokasi wisata waduk buatan Gampong Cot Gapu yang sudah tampak terlihat tumbuhnya rerumputan yang semak, jalan yang rusak, serta isi waduk yang mulai kotor hal tersebut terjadi karena gagalnya pengurus BUMG dalam mengelola objek wisata ini sehingga unit usaha tersebut terbengkalai karena tidak adanya aksi dari pengurus untuk memperbaiki ataupun membersihkan

lokasi wisata dan tidak ada tindak lanjut dari pengelola unit usaha tersebut baik dari pihak pengurus BUMG Gampong Cot Gapu maupun pemerintah Gampong.

Gagalnya pengurus BUMG dalam mengelola program BUMG dengan efektif sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Gampong dibuktikan adanya unit usaha BUMG yang tidak berjalan dengan efektif padahal BUMG Cot gapu sudah terverifikasi berbadan hukum secara resmi, sesuai data yang penulis temukan dilampiran.



Gambar 1.3 Situs Resmi Data BUMG Merpati Putih
(Sumber data : <https://sid.kemendes.go.id/news?page=3>)

Dari data diatas membuktikan bahwa BUMG Merpati Putih sudah terverifikasi berbadan resmi seharusnya dengan kelembagaan yang resmi dapat menstimulus para pengurus agar dapat lebih aktif dan serius lagi mengelola BUMG agar menunjukkan peningkatan baik dari segi tata kelolanya maupun pendapatan BUMG.

Dalam tata kelola BUMG Merpati Putih, terdapat sebuah permasalahan yang mendasar terkait seleksi pemilihan Direktur. Sayangnya, proses seleksi pengurus BUMG tidak mengadopsi prinsip-prinsip transparansi yang umumnya terdapat dalam proses *open recruitment* (perekrutan terbuka). Hal ini berarti bahwa tidak ada

prosedur formal atau kriteria yang jelas untuk menilai siapa yang benar-benar layak dan mampu mengelola BUMG Merpati Putih. Terlebih lagi, dalam pemilihan Direktur BUMG Merpati Putih, keputusan tampaknya didasarkan semata pada faktor kepercayaan tanpa mempertimbangkan kemampuan manajerial yang diperlukan untuk mengelola perusahaan dengan baik. Kriteria atau standar yang harus dimiliki oleh seorang direktur dalam hal kemampuan manajerial dan pengelolaan perusahaan tidak dijadikan acuan dalam proses pengangkatan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Maya selaku aparatur Gampong Cot Gapu (06/09/2023).

Akibatnya, hal ini menciptakan ketidakpastian dan kurangnya keyakinan dikalangan pemangku kepentingan terkait kemampuan pengurus dan direktur dalam menjalankan BUMG Merpati Putih secara efisien dan transparan. Kekurangan proses seleksi yang terstruktur dan kurangnya pertimbangan terhadap kompetensi manajerial dalam pemilihan kepemimpinan, secara tidak langsung dapat menghambat potensi perkembangan dan keberhasilan BUMG Merpati Putih dalam mencapai tujuan secara optimal. Ketidakjelasan dalam pengangkatan pengurus dan direktur dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam konteks ini, perbaikan dalam proses seleksi dan pengangkatan kepemimpinan sangat penting untuk memastikan bahwa BUMG Merpati Putih dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan visi serta misi yang telah ditetapkan. Dengan semakin kompleksnya permasalahan program BUMG yang dihadapi pemerintah desa maka memerlukan instrumen untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu perlu adanya pemahaman tata kelola sebuah program oleh para pengurus agar mampu mengelola program BUMG secara baik.

Selain itu kurangnya kepercayaan masyarakat, kurangnya manajemen dalam pengelolaannya dan kurangnya kerja sama dalam pengelolaan BUMG. Sehingga Pemerintah desa harus mencari solusi terbaik untuk melanjutkan aktivitas BUMG di Gampong di masa depan. Dengan semakin berkembangnya dunia usaha, tumbuh dan berkembangnya masyarakat serta semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang pada umumnya dibutuhkan oleh masyarakat Gampong Cot Gapu.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dilapangan bersama narasumber, BUMG Merpati Putih mempunyai permasalahan sumber daya manusia (SDM), terbukti dari direktur BUMG Merpati Putih yang hanya lulusan SMA dan terbatas teknologi informasi terbukti dari Direktur BUMG yang tidak menggunakan *smartphone* untuk berkomunikasi dengan para anggota BUMG. BUMG Merpati Putih Gampong Cot Gapu memiliki banyak potensi, terutama dari sektor pariwisata yang menjadi magnet Gampong. Dari deksripsi yang diberikan, bisa diketahui bahwa Gampong Cot Gapu memiliki banyak potensi tapi tidak terkelola dengan baik. Dari data diatas bisa sedikit menjadi acuan bahwa pengelolaan BUMG Merpati Putih tidak berjalan dengan baik dalam mengelola potensi yang ada

Tata kelola (*Governance*) merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan lembaga, termasuk BUMG sebagai lembaga usaha milik desa (Maulana, 2022; Tsauri, 2014; Sudarmanto dkk., 2021). Keharusan penerapan tata kelola yang baik pada BUMG didasarkan pada beberapa alasan sebagai bentuk tujuan sosial dan bisnis, sehingga perlunya tata kelola yang baik (Widiastuti dkk., 2019; Wiwik & Lucy, 2019; Borzaga & Defourny, 2001; Lindawati, 2018). Dalam mengelola BUMG sebagai bisnis pemerintah desa maka transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk

mencapai tata kelola organisasi yang optimal (Andriana dkk., 2021; Kurniasih & Wijaya, 2017; Rambu Ana & Ga, 2021). Sebagai badan usaha berbadan hukum, seperti PT atau BUMN, BUMG memerlukan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam mengelola BUMG (Alfiansyah, 2021; Ansori dkk., 2022; Winarsi & Moechthar, 2020). Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang tata kelola BUMG terkait dengan Keterbukaan Informasi, Kepengurusan BUMG, Pertanggungjaawaban BUMG serta hambatan BUMG berdasarkan pada Sumber Daya Manusia, Kepercayaan Masyarakat dan Kemitraan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola BUMG Merpati Putih di Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja hambatan dalam tata kelola BUMG di Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?

1.3 Fokus Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola BUMG di Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen pada aspek Keterbukaan Informasi, Kepengurusan BUMG dan Pertanggungjawaban BUMG.

2. Hambatan dalam tata kelola BUMG di Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen pada aspek Sumber Daya Manusia, Kepercayaan Masyarakat dan Kemitraan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang tata kelola (*Governance*) BUMG Merpati Putih di Gampong Cot Gapu memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola BUMG di Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dilihat pada aspek Keterbukaan Informasi, Kepengurusan BUMG dan Pertanggungjawaban BUMG.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam tata kelola BUMG di Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen pada aspek Sumber Daya Manusia, Kepercayaan Masyarakat dan Kemitraan.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah setempat dapat memberikan masukan konkrit dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan peran dan kontribusi BUMG dalam pembangunan desa.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu wawasan empirik, sumbangan pemikiran dan pengetahuan, serta menambah informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah, praktisi, dan akademisi dalam upaya pengelolaan BUMG yang lebih efektif dan berkelanjutan.